

Pengaruh Faktor Idiosinkratik Matteo Salvini Dalam Kebijakan Luar Negeri “*Salvini Decree*” Italia 2018

Galih Antonius Ola Lewoema

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Email : galihdeornay@gmail.com

Puguh Toko Arisanto

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Email : ptas002@gmail.com

Korespondensi penulis : galihdeornay@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Matteo Salvini's idiosyncratic factors in the output of anti-migrant policies, so called Salvini Decree in Italy after the winning of the 2018 general election. According to Matteo Salvini, the migrant issue is a threat to Italy's national identity. The authors analyze by using the idiosyncratic concept of leaders in the foreign policy output adopted by a country.. The findings in this research indicate that there is an influence of Matteo Salvini's perception and personality which has an impact on the foreign policy adopted by Italy in 2018. Aggressive foreign policy and excluding international law from the 1951 Refugee Convention and the Common European Asylum System (CEAS) regarding migrant issues is an indication of the perception elite in breaking through political boundaries. His high level of nationalism and ability to control events and be actively involved in policy making allows Salvini to act dominantly and tends to delegate less power to maintain his power through the anti-refugee terms promoted by Salvini.*

Keywords: *Immigrants, Salvini Decree, Idiosyncratic, Matteo Salvini, Italy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor idiosinkratik Matteo Salvini dalam kebijakan anti-migran atau dikenal juga sebagai *Salvini Decree* di Italia pasca kemenangan pemilihan umum pada tahun 2018. Menurut Matteo Salvini, isu migran merupakan sebuah ancaman bagi identitas nasional Italia. Penulis menganalisis menggunakan konsep idiosinkratik pemimpin dalam kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh sebuah negara. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan pengaruh persepsi dan kepribadian Matteo Salvini yang berdampak pada kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh Italia pada tahun 2018. Kebijakan luar negeri yang agresif dan mengecualikan hukum internasional dari Konvensi Pengungsi 1951 dan *Common European Asylum System* (CEAS) mengenai isu migran menjadi sebuah indikasi persepsi elit dalam menembus batasan-batasan politik. Sikap nasionalisme yang tinggi dan kemampuan mengontrol peristiwa serta terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan memungkinkan Salvini untuk bersikap dominan dan cenderung kurang mendelegasikan kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya melalui term anti-pengungsi yang diusung Salvini.

Kata Kunci : Imigran, *Salvini Decree*, Idiosinkratik, Matteo Salvini, Italia.

LATAR BELAKANG

Fenomena krisis pengungsi yang dimulai pada abad ke-21 memunculkan ancaman baru bagi negara – negara Eropa yang menjadi tujuan utama para pengungsi yang berasal dari Middle East and North African (MENA). Pada tahun 2018, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mencatat sebanyak 5,2 juta imigran yang berasal dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Irak, Suriah, Afghanistan, Yunani, Spanyol, dan Italia.

Tingginya gelombang pengungsi yang masuk ke negara-negara Uni Eropa memunculkan ketegangan antar negara-negara di Uni Eropa. Sebagai anggota dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Italia telah secara resmi mengesahkan Konvensi tahun 1951 mengenai status pengungsi. Oleh karena itu, Italia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memberikan perlindungan bagi pengungsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Mandat ini berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi yang menghadapi situasi konflik atau kekerasan di negara asalnya yang mengakibatkan perlunya perlindungan internasional baik dalam situasi darurat maupun non-darurat. Dalam hal ini, negara Italia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak internasional mereka (UNHCR, 2018). Selain itu, Italia juga meratifikasi kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) yang mengatur tentang pengungsi agar mendapatkan hak-hal di negara tujuan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun kebijakan suaka ini dinilai oleh negara-negara anggota kawasan tidak mampu mengatasi permasalahan krisis pengungsi yang terjadi di Eropa termasuk Italia. Hal ini kemudian mendorong Uni Eropa mengambil langkah dengan mengeluarkan *Chamber Choice* (EU) 2015/1523 tentang pembagian beban imigran secara merata ke semua negara anggota Uni Eropa. Kuota imigran di setiap negara disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masing-masing. Skema pembagian kuota dinilai tidak efektif karena pada dasarnya para imigran akan cenderung menetap di negara persinggahan pertama yang menurut mereka cukup aman untuk memulai kehidupan yang baru.

Faktor kedekatan geografis Italia berpengaruh pada lonjakan angka imigran. Italia merupakan negara Mediterania yang terletak di Eropa Selatan yang berdekatan langsung dengan laut mediterania. Pada prinsipnya, Laut Mediterania memiliki tiga rute migrasi utama, termasuk Laut Mediterania Tengah yang menjadi jalur akses dari Afrika Utara ke Italia, Laut Mediterania Timur yang menjadi jalur dari Turki ke Yunani, dan Laut Mediterania Barat yang menjadi rute dari Maroko ke Spanyol (Fiernaya, 2021). Jalur melalui Laut Mediterania menjadi rute utama bagi pengungsi yang menuju daratan Eropa sebagai tujuan utama mereka. Italia, sebagai negara yang berbatasan dengan jalur yang digunakan oleh para pengungsi, khususnya

menjadi perhatian utama dalam mengamankan perbatasan saat menghadapi lonjakan pengungsi.

Terpilihnya Matteo Salvini menjadi Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dari partai sayap kanan *Lega Nord* (LN) setelah berkoalisi dengan Partai *Five Movement Star* (M5S) pada tahun 2018, berdampak pada perubahan secara fundamental mengenai isu imigran yang mencari suaka ke Italia. Italia mengalami perubahan arah kebijakan yang cenderung anti-imigran. Perubahan ini dipimpin oleh Matteo Salvini dan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan Italia pada saat itu. Kebijakan anti-imigran yang dirancang oleh Salvini kemudian tertuang dalam *Salvini Decree* (Dekrit Salvini) yang memuat tentang pencabutan visa kemanusiaan, pelarangan kapal yang hendak berlabuh di Italia dan pemberian denda kepada organisasi non-pemerintah yang membawa pengungsi masuk ke Italia.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri dalam Negeri, sikap anti-pengungsi Salvini sudah terlihat selama kampanyenya. Salvini mencanangkan kebijakan deportasi 500 ribu pengungsi yang berada di Italia dikembalikan ke negara asal mereka dan juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pengungsi yang beragama Islam merupakan ancaman nasional Italia (Perrone, 2018). Setelah Matteo Salvini menjabat dalam posisi pemerintahan, kebijakan anti-imigran yang diterapkan oleh Pemerintah Italia berdampak langsung pada para pengungsi yang tidak memiliki jalan masuk dan akhirnya terlantar. Mereka bergantung pada negara-negara lain di Uni Eropa untuk pertolongan. Italia mengadopsi sikap ini melalui kebijakan luar negerinya yang menolak kedatangan dan masuknya pengungsi ke wilayahnya. Tindakan ini diambil dengan alasan perlindungan terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat Italia (Wicaksono, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, singkatnya setelah Matteo Salvini memenangkan pemilu dari Partai Lega Nord yang berkoalisi dengan *Five Movement Stars* (M5S), arah kebijakan luar negeri mengalami perubahan yang secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan *Salvini Decree* yang dinilai mengingkari posisi Italia yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan CEAS tentang perlindungan imigran. Kebijakan ini diadaptasi dari usulan Matteo Salvini setelah memenangkan pemilu tahun 2018. Kebijakan Salvini yang menolak pengungsi dan menutup pelabuhan untuk kapal yang membawa masuk pengungsi dinilai banyak pihak telah melanggar Konvensi yang diratifikasi. Italia tidak menjalankan aturan yang sudah diratifikasi dalam aturan nasionalnya sejak tahun 2018. Kebijakan Salvini Decree yang diterapkan oleh Matteo Salvini dan disahkan oleh Senat Italia pada November 2018 menuai banyak protes dan unjuk rasa di Roma sebagai bentuk penolakan terhadap dekrit Salvini tersebut. Namun Matteo Salvini

dengan tegas menjelaskan bahwa ini sebagai bentuk melindungi Italia dari ancaman keamanan nasional yang berasal pengungsi yang masuk (ECRE, 2018).

Penulis melihat bahwa dekrit Salvini yang dikeluarkan oleh pemerintah Italia dalam menyelesaikan isu imigran tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis Italia yang merupakan pintu terdekat masuknya imigran ke Eropa semata, akan tetapi terdapat faktor yang berdimensi politik dan idiosinkratik pemimpin dalam proses perumusannya kebijakan luar negeri tersebut. Oleh karena itu, penulis hendak menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Italia dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Penulis akan menggunakan teori model idiosinkratik untuk menganalisis pengaruh kepribadian pemimpin dalam merumuskan arah kebijakan luar negerinya.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri

Konsep Idiosinkratik pada dasarnya merupakan model analisis mengenai pengaruh pada level individu dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri. Konsep ini juga dikenal dengan istilah "*persepsi elit*" yang kemudian didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat pada sosok pribadi seorang pemimpin. Konsep idiosinkratik sebagai salah satu pendekatan psikoanalisis dalam kebijakan luar negeri bersumber dari psikologi atau kepribadian seorang pemimpin yang kemudian membentuk karakter seorang pemimpin. Kepribadian seorang pemimpin ini kemudian berpengaruh pada kebijakan atau politik di sebuah negara (Herman, 1980).

Karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin menjadi aspek utama dari konsep idiosinkratik dalam menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan. Dalam hal ini kebijakan di dalam sebuah negara bersumber pada keputusan individu pemimpin. Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan indikator-indikator konsep idiosinkratik yang ditawarkan oleh Margaret G. Hermann. Menurut pandangan Hermann, pendekatan ini memberikan gambaran perkiraan tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri terjadi. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan karakteristik pribadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan. Proses ini melibatkan analisis mendalam dan pemetaan psikologis serta proses kognitif yang terlibat dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin (Hermann, et al., 1980).

a. Nationalism

Nationalism atau rasa nasionalisme merupakan karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau individu yang melihat bangsanya sebagai pusat perhatian.

Adanya jalinan emosional yang kuat yang mendorong seorang pemimpin untuk menjaga eksistensi dan identitas nasional negaranya (Hermann, et al., 1980).

b. *Belief in Ability to Influence or Control Events*

Asumsi dari tahap ini adalah ketika pemimpin merencanakan dan menginisiasi suatu aksi, maka pemimpin tersebut percaya bahwa mereka memiliki kendali atas situasi yg dihadapi. Pada dasarnya pemimpin ini cenderung untuk proaktif dalam proses pembuatan suatu kebijakan yang ada di sebuah negara. Pemimpin yang memiliki *high believe in ability to influence or control events*, cenderung kurang mendelegasikan kekuasaan, tipe pemimpin ini suka menginisiasi dan mengambil alih sebuah peristiwa atau masalah, karena menurut mereka bahwa dia mampu untuk mempengaruhi peristiwa tersebut. Selain itu mereka juga sulit untuk berkompromi dan membuat kesepakatan dengan pihak lain. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki keyakinan *low*, cenderung lebih reaktif, mencoba untuk memahami situasi sebuah permasalahan sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Tipe pemimpin ini juga lebih kurang dalam berinisiatif, dia akan melepaskan tanggung jawab jika menurutnya itu sudah berada diluar kendali pemimpin tersebut (Hermann, et al., 1980).

c. *Need for Power*

Ketika keinginan seorang pemimpin yang memiliki kebutuhan *high need for power*, mereka cenderung akan memanipulasi lingkungan untuk mencapai kontrol dan dominasi sebagai pemenang. Namun, pemimpin dengan keinginan rendah *low need for power*, cenderung enggan untuk bersikap dominan. Mereka bahkan mungkin mengorbankan kepentingan pribadi demi kelompok mereka. Selain itu, pemimpin semacam ini memiliki sensitivitas terhadap keadilan, membangun rasa saling percaya dengan anggota tim, dan merasakan tanggung jawab bersama (Herrmann, et al., 1980).

d. *Need for Affiliation*

Need for Affiliation atau kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi merupakan kebutuhan akan membangun sebuah hubungan yang baik dengan suatu individu atau kelompok lain. Kebutuhan akan afiliasi ini mendorong akan sebuah pola hubungan yang lebih terbuka dengan orang dan informasi yang datang dari luar (Hermann, et al., 1980).

e. *Conceptual Complexity*

Pemimpin dengan tingkat *high conceptual complexity* mampu memahami situasi dengan baik dan merumuskan rencana tindakan yang tepat. Mereka mampu mengatasi situasi yang ambigu dengan kemampuan yang baik dan terbuka terhadap dukungan dan masukan dari pihak lain. Mereka juga mempertimbangkan reaksi baik dari tingkat internasional maupun domestik terhadap tindakan yang diambil. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin dengan tingkat konseptualisasi yang tinggi melibatkan berbagai aktor dan mengambil waktu untuk berpikir secara mendalam. Sebaliknya, pemimpin dengan tingkat *low conceptual complexity* cenderung kurang fleksibel dan melihat segala sesuatu dalam terminologi sederhana seperti baik-buruk, hitam-putih, atau teman-musuh (Hermann, et al., 1980).

f. *Distrust of Others*

Pemimpin yang memiliki tingkat *high distrust of others*, mudah untuk merasa curiga atas segala tindakan pihak lain, terutama dengan pihak lawan. Rasa ketidakpercayaan tinggi seorang pemimpin menyebabkan pemimpin tersebut tidak bergantung pada orang lain. Rasa ketidakpercayaan ini sering menimbulkan pandangan *zero-sum*, artinya bahwa hanya ada satu pemenang. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki *low distrust of others*, cenderung menempatkan dirinya dalam sebuah perspektif. Rasa percaya dan tidak percaya pemimpin ini cenderung bergantung pada konteks masa lalu, tergantung dari permasalahan yang dihadapi (Hermann, et al., 1980).

Berdasarkan enam indikator yang ditawarkan oleh Hermann diatas, peneliti akan menemukan tiga karakteristik utama atau kepribadian yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang lebih umum dalam mengambil sebuah keluaran kebijakan. Tiga karakteristik pemimpin yang dimaksud oleh Hermann, yaitu (Mintz, 2010):

- a. Apakah seorang pemimpin itu mengikuti kendala-kendala politik?
- b. Apakah pemimpin tersebut terbuka terhadap informasi-informasi baru yang masuk?
- c. Apakah pemimpin tersebut lebih fokus pada masalah atau hubungan?

Menurut Hermann, pengetahuan mengenai tiga karakteristik individu seorang pemimpin yang umum diatas akan memberikan data tentang orientasi dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mereka. Menurutnya, ada dua karakteristik umum yang dimiliki yakni: *Aggressive* dan *Conciliatory* (Hermann, 1980).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami dan dirasakan oleh subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus (Moleong, 2007). Penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif digunakan tidak hanya menggambarkan sebuah peristiwa atau fenomena yang timbul saja, melainkan meneliti mengenai sesuatu yang kemudian menjadi latar belakang kenapa fenomena itu terjadi. Metode ini mengarahkan pada pengamatan objek terhadap sebuah fenomena sosial. Gejala-gejala sosial yang dimaksud disini merupakan suatu keadaan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Sedangkan studi kasus merupakan metode penelitian yang berfokus pada sebuah pemahaman suatu fenomena dalam konteks secara mendalam mengenai hubungan dan keterkaitannya. Dalam upaya memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi pustaka (Sugiyono, 2011). Temuan dari literatur ini kemudian disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pengaruh "*persepsi elit*" terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Salvini Decree* dan Kebijakan Migran Pemerintahan Italia Sebelumnya**

Hukum Italia awal di bidang imigrasi secara informal dikenal sebagai undang-undang Foschi (1986) dan undang-undang Martelli (1989). Kedua undang-undang ini memiliki relevansi dalam mengakui hak-hak para migran dan meningkatkan status pekerja asing serta pencari suaka. Dari sudut hukum, Italia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur isu imigrasi. *Pertama* adalah undang-undang nomor 286/1998 dan undang-undang nomor 189/2002, yang mengatur regulasi mengenai perlakuan terhadap warga asing dan pemberlakuan yang setara antara warga negara serta pencari suaka. Inti dari peraturan-peraturan ini adalah memperketat norma-norma guna membantu pengembalian imigran yang memasuki negara secara ilegal.

Kedua, terdapat undang-undang nomor 91/1992 yang mengatur tentang regulasi naturalisasi melalui pernikahan dan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran yang tiba di Italia sebelum mencapai usia 12 tahun. Sebagai tambahan, undang-undang nomor 205/1993, 215/2003, dan UU nomor 216/2003 yang dikenal sebagai Hukum Mancino,

merumuskan konsep yang mengatur perlakuan yang adil dan melarang diskriminasi berdasarkan kekerasan, ras, agama, dan asal bangsa (La Spina, 1996). *Ketiga*, pada tahun 2017, Italia mengadopsi undang-undang nomor 46/2017 yang mengatur langkah-langkah imigrasi dan kontrol perbatasan baru bagi para pencari suaka. Italia menetapkan beberapa langkah imigrasi dan kontrol suaka baru. Secara khusus, hal ini memperkenalkan artikel baru pada *Solidified Migration Act* yang memperluas kriteria untuk menilai imigran yang masuk dan meminimalisir imigran dengan risiko melarikan diri tanpa pemberian sidik jari (Chaloff, 1998).

Italia merupakan salah satu negara yang mengesahkan atau meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) di Eropa mengenai Status Pengungsi. Oleh karena itu, Italia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memproteksi para pengungsi sesuai mandatnya. Mandat ini melibatkan perlindungan bagi pengungsi yang menghadapi konflik atau kekerasan di negara asal mereka, dan mengakibatkan perlunya perlindungan internasional, baik dalam situasi darurat maupun non-darurat. Dalam konteks ini, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak internasional mereka dilindungi yang kemudian dapat ditemukan dalam prinsip *non refoulement*. Prinsip *non refoulement* merupakan hal yang fundamental dalam sistem hukum pengungsi internasional sehingga tidak boleh dikesampingkan (Brownlie, 2000).

Kebijakan anti-migran di Italia ditandai dengan kenaikan pemimpin partai sayap kanan Lega Nord (LN) yang berkoalisi dengan partai *Five Movement Star* (M5S) yakni, Matteo Salvini sebagai Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri Giuseppe Conte, yang menjabat selama 14 bulan. Kebijakan anti-migran *Salvini Decree* yang diadopsi oleh Italia merupakan gagasan yang bersumber Matteo Salvini pada Tahun 2018 ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Italia. Kebijakan anti-migran tersebut kemudian dikenal dengan "*Salvini Decree*".

Kebijakan *Salvini Decree* (diubah dari Keputusan UU No. 113 tanggal 4 Oktober, dengan amandemen menjadi UU No. 132 tanggal 1 Desember 2018) merupakan salah satu langkah yang memenuhi syarat sebagai kebijakan Pemerintah Italia saat ini. Tujuan dari kebijakan ini, sebagaimana tercantum dalam laporan yang menyertai rancangan undang-undang konversi, adalah untuk mengatur ulang "sistem pengakuan atas perlindungan internasional dan bentuk-bentuk pengawasan yang saling melengkapi guna mencapai 'pengelolaan fenomena migrasi yang lebih efisien dan efektif'" (Pusat Kebijakan Migrasi, 2019). Perubahan peraturan keimigrasian dan kewarganegaraan Italia *Salvini Decree* (Decreto Salvini) pada 4 Oktober 2018 tertuang dalam Decreto Salvini 113/2018 yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Tahun 2018. Pada dasarnya Pasal 14 Undang-Undang 2018 ini

membahas mengenai permohonan kewarganegaraan Italia. Dekrit Salvini ini kemudian merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan 1992 (No. 91, 5 Februari 1998) tentang peraturan imigrasi dan status hukum orang asing di Italia (No. 40, 6 Maret UU konsolidasi No. 286, 25 Juli), dan reformasi pusat-kanan di 2002, yaitu norma yang mengenai Imigrasi dan suaka (No. 189, 30 July). Pasal 5 Undang-Undang Tahun 1992 mengenai permohonan kewarganegaraan Italia atas dasar perkawinan dan Pasal 9 Undang-Undang tahun 1992 mengenai izin tinggal di Italia. Dalam Dekrit Salvini yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Tahun 2018, izin tinggal yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang 1992 mengenai alasan kemanusiaan, telah dihapuskan dan diganti dengan izin tinggal yang terbatas dalam kategori “kasus-kasus khusus”. Selain itu, disebutkan juga bahwa sistem publik yang kemudian dikenal dengan “*Sprar*” untuk menerima imigran yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang 1992 diganti dengan sistem Penerimaan Luar Biasa (CAS), dimana sistem ini cenderung menawarkan standar yang lebih rendah (Corsi, 2019).

Dalam kebijakan Salvini ada beberapa poin perubahan yang dirancang (Fiernaya, 2021); *pertama*: kebijakan pencabutan visa kemanusiaan. Keputusan Salvini ini juga membatasi migran dalam mengakses ke tempat penampungan yang disediakan. Hal ini berdampak pada populasi migran yang ada di Italia rentan terhadap status hukum yang dimiliki serta migran yang masuk dan kemudian harus pergi lagi disebabkan oleh sulitnya pemenuhan syarat yang dimaksud dalam point ini. *Kedua*: pelarangan terhadap kapal yang memasuki teritorial laut Italia. *Ketiga*: adanya pemberian sanksi (denda) terhadap organisasi non-pemerintah yang melabuhkan para migran di Italia. *Keempat*: waktu yang dihabiskan di pusat repatriasi. Keputusan Salvini malah menggandakan batas waktu 90 hari menjadi maksimal 180 hari. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa orang asing dapat ditahan di tempat lain selain Pusat Repatriasi di fasilitas yang sesuai dan tersedia bagi otoritas keamanan publik. *Kelima*: Penolakan dan penarikan perlindungan internasional serta permohonan suaka. Undang-undang sebelumnya mengatur bahwa status pengungsi dapat ditolak atau dicabut ketika orang asing tersebut membahayakan ketertiban umum dan keamanan publik karena adanya hukuman akhir atas kejahatan seperti pembunuhan dan pelecehan seksual. Dengan adanya dekret Salvini, pelanggaran lebih lanjut menyebabkan penolakan atau penarikan perlindungan internasional, mulai dari pelecehan atau ancaman terhadap pejabat publik, hingga cedera pribadi yang parah, hingga berbagai pelanggaran pencurian.

Analisis Pengaruh Faktor Idiosinkratik Matteo Salvini Dalam Kebijakan "Salvini Decree"

Sifat-sifat dan karakteristik dari kepribadian tersebut dapat membantu menjelaskan kecenderungan pemimpin dalam suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dipilih oleh seorang pemimpin dalam menyelesaikan masalah (Karboo, 2017).

1. Nationalism

Matteo Salvini sebelum menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Italia pada 2018, Salvini menjabat sebagai pemimpin Partai Lega Nord dan politisi yang berhaluan kanan. Sikap *high nationalism* yang dimiliki oleh Salvini, ditunjukkan melalui kampanye anti-imigran yang diusung. Menurut Salvini, imigran adalah sebuah bentuk ancaman terhadap identitas Italia. Selain itu, sikap *high nationalism* Salvini juga dapat ditemukan dari perubahan arah ideologi Partai yang dipimpin yang pada awalnya regionalisasi yang hanya memperjuangkan wilayah utara Italia berubah menjadi nasionalisme.

2. Belief in Ability to Influence or Control Events

Matteo Salvini sendiri lebih menempatkan dirinya pada posisi menginisiasi dan terlibat dalam banyak pengambilan keputusan mengenai persoalan yang dihadapi oleh Italia, dalam hal ini merupakan isu imigran gelap di Italia yang meningkat secara signifikan terhitung sejak 2014 dan 2015 semenjak Eropa mengeluarkan peringatan akan darurat migran yang masuk ke Eropa. Sikap Matteo Salvini ini kemudian dapat ditemukan dalam beberapa aksi dan kebijakan yang menginisiasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Italia. *Pertama:* Salvini bergabung dalam unjuk rasa di Veneto dalam Kampanye Pemilihan Administratif Liga Utara. Dalam kesempatan ini Salvini secara terang-terang mengecam dan mengancam semua imigran yang ada di Italia. *Kedua:* Salvini mengeluarkan kebijakan penutupan pelabuhan (*Closed Port Policy*). Kebijakan penutupan pelabuhan ini bertujuan untuk melarang semua kapal yang hendak membawa masuk imigran untuk masuk ke Italia. *Ketiga:* Matteo Salvini mendesak Pemerintah Italia untuk melakukan "Sensus Roma".

High Belief in Ability to Influence or Control Events yang dimiliki Matteo Salvini, menunjukkan kepribadian Salvini yang mengasumsikan bahwa Salvini percaya bahwa dirinya mampu dan memiliki kendali atas situasi yang dihadapi. Hal ini kemudian dapat ditemukan seperti yang dijelaskan oleh Herman, bahwa pemimpin tipe ini sangat yakin bahwa mereka dapat memberikan dampak pada dunia, maka mereka

agak lebih sulit tentunya untuk berkompromi atau dalam membuat keputusan dengan pihak lain.

3. *Need for Power and Influence*

High Need for Power and Influence atau tingginya kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh Matteo Salvini melalui kebijakan dan radikalisasi partai Lega Nord yang semakin nasional sebagai upaya untuk mempertahankan dan memulihkan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin. Artinya, perubahan haluan Partai LN yang pada awalnya hanya memperjuangkan wilayah “*utara*” mengalami perubahan arah dan tujuan yang lebih luas mencakup seluruh wilayah Italia. Hal ini, kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan kekuasaan melalui dukungan yang lebih luas akan memudahkan Salvini dalam mewujudkan tujuan yang hendak dibawa olehnya.

4. *Conceptual Complexity*

Matteo Salvini merupakan pemimpin yang memiliki *low conceptual complexity*, hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang lebih mementingkan isu dalam negeri dibandingkan hubungannya dengan sebuah pola luar negeri. Hal ini tercermin dalam kebijakan *Salvini Decree*. *Salvini Decree* merupakan kebijakan anti imigran yang memfokuskan pada penyelesaian persoalan domestik akibat lonjakan angka migran yang masuk ke Italia sejak 2014 lalu. Kemudian diikuti dengan Sensus Roma, hal ini kemudian menunjukkan akan keseriusan Matteo Salvini dalam menyelesaikan persoalan domestik dibandingkan dengan sebuah pola hubungan luar negeri. Selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Salvini lebih memfokuskan kebijakannya pada isu domestik. Pribadi nasionalis yang tinggi berpengaruh pada arah kebijakan yang diambil oleh Salvini. Pada dasarnya kebijakan ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pengingkaran terhadap Konvensi 1958 dan *Common European Asylum System* yang sudah diratifikasi oleh Italia sebelumnya mengenai perlindungan pengungsi dan keharusan bagi Italia itu sendiri.

5. *Distrust of Others*

Matteo Salvini merupakan pemimpin yang memiliki *High Distrust of Others*. Tingginya ketidakpercayaan Salvini terhadap orang lain dapat dilihat dari *pertama*: sikap sentimen terhadap orang asing (imigran). Sikap Salvini yang tidak percaya pada orang asing sering ditunjukkan dalam ucapan langsung dihadapan media ataupun

kampanye-kampanye yang dilakukan sebelum dan sesudah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Italia tahun 2018. Pada dasarnya Salvini menganggap orang asing sudah terlalu banyak makan dari hak-hak orang Italia. Hal ini menurutnya akan berdampak pada kondisi sosial maupun ekonomi Italia. *Kedua:* mengingkari koalisi Partainya dengan Partai *Five Movement Stars* (M5S) yang dipimpin oleh Luigi Di Maio sekaligus wakilnya dalam Kementrian Dalam Negeri Italia tahun 2018.

Ketiga: sikap *eurosceptic*. Menurut Salvini regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE) adalah sebuah ketidakpastian yang hanya akan membelenggu negara-negara anggotanya. Kegagalan UE yang dimaksud oleh Salvini disini mengenai peraturan pengungsi yang tidak efektif dan sistem keuangan *euro*.

6. *Need for Affiliation*

Matteo Salvini merupakan tipe pemimpin yang memiliki *Low Need for Affiliation*. Rendahnya kebutuhan akan afiliasi yang dimiliki oleh Salvini tidak terlepas dari sejarah politik dan hubungannya dengan kelompok atau individu politik lainnya. Kebutuhan akan afiliasi yang rendah tersebut dapat dilihat dari sikap Salvini yang menolak bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang menyelamatkan migran di Laut Mediterania untuk dibawa masuk ke Italia. Menurut Salvini, negara adalah entitas tertinggi dan tidak ada keterwakilan yang boleh dilakukan oleh LSM. Selain itu, dalam kepemimpinannya pada tahun 2018, Salvini menolak semua kerjasama yang pernah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebelumnya, seperti *Operasi Mare Nostrum*, *Operasi Triton* ataupun MoU Tripoli dengan Libya mengenai proses penyelamatan migran di Laut Mediterania untuk dibawa masuk ke Italia. Menurut Salvini sikap ini akan memberikan kenyamanan bagi para imigran. Artinya, dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang disebutkan di atas, para migran akan merasa bahwa mereka akan diselamatkan oleh Italia dan akan diberikan tempat tinggal di Italia seperti yang mereka harapkan.

Matteo Salvini merupakan pemimpin yang cenderung menentang kendala yang ada dan lebih berminat untuk berhadapan dengan situasi secara langsung untuk mencapai sebuah resolusi yang cepat untuk sebuah masalah, serta bersikap tegas dalam menangani sebuah persoalan. Ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Italia pada tahun 2018, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut penulis menentang batas-batas politik yang ada di Italia. Hal ini kemudian tercermin dari kebijakan anti migrannya yang

terkenal *Salvini Decree*. Dekrit Salvini merupakan merupakan terobosan yang melampaui batasan politik yang dimiliki oleh Italia, hal ini disebabkan karena Italia merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi, oleh karena itu, Italia sebagai negara peratifikasi berkewajiban menaati konvensi tersebut. Selain itu, Italia sebagai negara anggota Uni Eropa, Italia juga meratifikasi *Common European Asylum System (CEAS)*. CEAS merupakan kerangka hukum dan kebijakan yang dikembangkan untuk menjamin standar yang selaras dan seragam bagi orang-orang yang mencari perlindungan internasional di Uni Eropa (EUAA, 2020). Karakteristik Salvini yang secara tegas menghadapi masalah dan mencari resolusi cepat untuk menyelesaikan masalah sangat ditonjolkan dari sikap dan kebijakan yang dikeluarkan seperti yang disebutkan diatas.

Dengan demikian, Matteo Salvini merupakan pemimpin yang kurang terbuka terhadap informasi-informasi, cenderung ditemukan bertindak sebagai seorang advokat atau pembela suatu kelompok atau orang. Hal ini sangat relevan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Salvini. Menurut penulis kebijakan Salvini ini merupakan bentuk dari sikap *high nationalism* yang dimiliki Salvini dalam menjaga eksistensi masyarakat Italia dari orang asing (imigran) yang ada di Italia sampai dengan sekarang. Menurut Hermann, seorang pemimpin yang termotivasi oleh hubungan yang mereka inginkan dengan orang lain, bagi pemimpin yang seperti ini mobilitas dan efektivitas sebagai alat persuasi dan menjadi hal yang menonjol dalam pergerakan mencapai tujuan mereka. Begitu pula sebaliknya, Salvini ketika menjabat dan sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Wakil Perdana Menteri, pola hubungan persuasi dalam mencapai sebuah tujuan sangat sedikit dan dikategorikan sangat rendah. Dalam hal ini setiap gagasan didasari pada fokus internal, gagasan dan ideologi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis menemukan bahwa Salvini merupakan pemimpin yang *aggressive* dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Karakteristik kepribadian atau idiosinkratik Matteo Salvini memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Italia terkait keamanan terhadap ancaman akan identitas dan konflik sosial yang ditimbulkan oleh imigran yang masuk dan tinggal di Italia. Dengan Menelaah latar belakang dan enam indikator yang ditawarkan oleh Margaret G. Hermann, penulis menemukan bahwa Matteo Salvini memiliki: a) *High Nationalism* (memiliki sikap nasionalisme yang tinggi), b) *High belief in ability to influence or control events* (memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempengaruhi peristiwa), c) *High need for power* (memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi), d) *low need for affiliation* (rendahnya

kebutuhan akan afiliasi), e) *low distrust of others* (rendahnya rasa tidak percaya terhadap orang lain), f) *Low conceptual complexity* (rendahnya kompleksitas konseptual). Matteo Salvini merupakan tipe pemimpin yang lebih fokus pada tujuan yakni menyelesaikan persoalan pengungsi di Italia. Salvini menganggap bahwa isu migran dan lonjakan migran yang dialami oleh Italia sejak 2014 lalu merupakan sebuah ancaman serius bagi identitas Italia. Kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman dan terlibat secara aktif dalam membuat kebijakan. Dari indikator yang ditawarkan oleh Hermann dan temuan dalam penelitian ini bahwa Salvini merupakan tipe pemimpin yang *aggressive* dalam mengambil sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlie, I. (2000). *Principles of Public International Law*,. Fifth Edition (New York: Clarendon Press, 2000).
- Chaloff, J. (1998). *Current Research into Education for Immigrants in Italy. Paper presented in the 4th International Metropolis Conference, Desember 1999.*
- Corsi, C. (2019). Evaluating the 'Salvini Decree': Doubts of Constitutional Legitimacy. Europe University Institute. Available at: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/61784/PB_2019_06_MPC.pdf , diakses pada 20 November 2023.
- European Council on Refugees and Exiles. (2018). *Salvini Decree Approved by Italian Senate, Amid Citizen's Protests and Institutional Criticism.* Available at: <https://ecre-org.translate.google.com/salvini-decree-approved-by-italian-senate-amid-citizens-protests-and-institutional-> , diakses pada 11 Januari 2024.
- European Union Agency for Asylum. (2020). *The Common European Asylum System and current issues.* Available at: <https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/21-common-european-asylum-system-and-current-issues> , diakses pada 2 Januari 2024.
- Fiernaya, M. (2021). *Kebijakan Pemerintah Italia Terhadap Imigran.* *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 8(1), 1–15.
- Hermann, M. G. (1980). *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders.* *International Studies Quarterly*, 7-16.
- Hermann, M. G. (1999). *Assessing Leadership Style: A TRAIT ANALYSIS.*
- Karboo, J. (2017). *Personality and International Politics: Insights from Existing.* *European Review of International Research and Direction for the Future*, 20-38.
- La Spina, A. (1996). *'Partiti e mercato: le politiche di regolazione'*, in *Il gigante dai piedi d'argilla*, in M. Cotta and F. Isernia. 273-336.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Perrone, A. (2018). Who is Matteo Salvini, Italy's new radical interior minister? Aljazeera. Available at: <https://www.aljazeera.com/features/2018/6/25/who-is-matteo-salvini-italys-new-radical-interior-minister>, diakses pada 20 Januari 2024.

Sugiyono. (2011). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.

UNHCR. (2018). Europe Monthly Report. Available at: <https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/65078>. Diakses pada 17 Januari 2024.

UNHCR. (2018). UNHCR calls on Europe to stand by humanitarian principles, receive rescued Diciotti passengers. Available at: <https://www.unhcr.org/news/press/2018/8/5b805f6e4/unhcr-calls-europe-humanitarian-principles-receive-rescueddiciotti-passengers.html>. Diakses pada 10 Januari 2024.

Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016). Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/>

Wicaksono, H. L., & Alamari, M. F. (2022). Faktor Domestik Penolakan Italia terhadap Pengungsi dari Afrika Utara tahun 2015-2019. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar 1(1):15-27. <https://doi.org/10.47354/jjihif.v1i1.439>.